

PERANCANGAN KANTOR DAN KLINIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PENDEKATAN FLEKSIBILITAS

Raudhatul Jannah¹⁾

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta

Email : radharj@gmail.com

Hendrino²⁾

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta

Email : hendrino@bunghatta.ac.id

Rini Afrimayetti³⁾

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta

Email : riniafrimayetti@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Peningkatan permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, menuntut peran yang lebih optimal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sebagai lembaga yang berwenang dalam pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keberadaan kantor yang representatif dan klinik rehabilitasi yang memadai merupakan kebutuhan penting untuk mendukung kinerja lembaga ini. Perencanaan Kantor dan Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dilatarbelakangi oleh kondisi eksisting kantor yang masih berstatus pinjam pakai sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ruang, standar pelayanan, dan kapasitas pegawai yang ideal. Jumlah pegawai saat ini sebanyak 64 orang, sedangkan kebutuhan ideal mencapai 153 orang. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan dalam fleksibilitas penggunaan ruang, efisiensi operasional, serta pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan studi preseden. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan arsitektural, fungsi organisasi, serta kebutuhan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan fleksibilitas dapat diwujudkan melalui konsep ruang modular, *movable partition*, dan *transformable* layout yang memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi dan kebijakan BNN. Penerapan fleksibilitas juga mencakup pemanfaatan furnitur adaptif, sistem teknologi cerdas, serta pengaturan zoning yang jelas antara ruang publik, semi publik, dan privat. Dengan demikian, rancangan ini diharapkan mampu mendukung kinerja BNNP Sumbar dalam melaksanakan misi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan kolaboratif.

Kata Kunci: Arsitektur fleksibilitas, BNNP Sumatera Barat, perencanaan kantor, ruang modular

ABSTRACT

The increasing problem of drug abuse in Indonesia, particularly in West Sumatra Province, demands a more optimal role from the National Narcotics Agency (BNNP) as the institution authorized to prevent, eradicate, rehabilitate, and provide health services to the community. The existence of a representative office and adequate rehabilitation clinic is a crucial requirement to support the performance of this institution. The planning of the Office and Clinic of the National Narcotics Agency (BNNP) of West Sumatra Province was motivated by the existing condition of the office, which is still under lease, which is unable to meet the needs of space, service standards, and ideal staff capacity. The current number of employees is 64 people, while the ideal requirement is 153 people. This condition creates limitations in the flexibility of space use, operational efficiency, and public services. This research uses a qualitative method with a case study approach through field observations, interviews, documentation, literature review, and precedent studies. Analysis was conducted to identify architectural issues, organizational functions, and space requirements. The results show that a flexible approach can be realized through the concept of modular space, movable partitions, and transformable layouts that allow for adjustments to organizational developments and BNN policies. The application of flexibility also includes the use of adaptive furniture, smart technology systems, and clear zoning arrangements between public, semi-public, and private spaces. Therefore, this design is expected to support the West Sumatra BNNP's performance in implementing its P4GN (Prevention, Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking) mission, improve the effectiveness of public services, and create an efficient and collaborative work environment.

Keyword : Flexibility architecture, BNNP West Sumatra, office planning, modular space

PENDAHULUAN

BNN adalah Lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN Pusat (ditingkat nasional) memiliki dua instansi vertikal yaitu tingkat Provinsi dan tingkat Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba dan berwenang dalam pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keberadaan kantor yang representatif dan klinik rehabilitasi yang memadai merupakan kebutuhan penting untuk mendukung kinerja lembaga ini.

Berdasarkan Rencana Program Kerja Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Sumatera Barat 2020 – 2024, berdasarkan data sarana prasarana perkantoran saat ini Provinsi Sumatera Barat belum memiliki bangunan kantor. Kantor BNN Provinsi Sumatera Barat masih berstatus pinjam pakai dari milik pihak swasta yang tidak sepenuhnya milik BNN Provinsi Sumatera Barat sehingga tidak terpenuhinya fasilitas dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang mana tiap pelaksanaan tugas membutuhkan fasilitas. Seperti penanganan dalam pemberantasan pengedar narkoba, kantor membutuhkan ruang penyimpanan dan ruang pemusnahan narkoba. Dan Klinik yang berfungsi sebagai fasilitas yang memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba, termasuk konsultasi, detoksifikasi, terapi, dan konseling. Klinik ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pemulihan, memberikan dukungan psikologis dan medis, serta menjadi pusat rujukan untuk rehabilitasi. Namun saat ini ruang kerja pegawai yang tidak memenuhi kebutuhan dan standar ruang yang ditetapkan oleh BNN, baik dari ukuran, desain interior, dan kondisi bangunan yang sebelumnya juga terdapat masalah

pencahayaannya yang tidak memenuhi ruang kerja yang optimal. Pengorganisasian ruang dalam kantor yang tidak teratur menyebabkan pengunjung susah membedakan area mana yang boleh dikunjungi dan dibatasi sehingga dibutuhkan perancangan tata letak ruangan yang memberikan zoning dan privasi.

Kondisi ini menimbulkan berbagai keterbatasan, baik dalam hal kapasitas ruang, fleksibilitas penggunaan, maupun efisiensi biaya. Berdasarkan data, jumlah pegawai yang ada saat ini adalah 64 orang, jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 153 pegawai. Kekurangan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan perencanaan kantor yang lebih memadai untuk menunjang operasional dan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020 – 2024, standar yang mengatur tata kelola institusi pemerintah, kantor BNN Provinsi idealnya dirancang dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti memiliki ruang kerja yang memadai sesuai dengan jumlah pegawai, tersedia fasilitas penunjang seperti ruang rapat, ruang pelayanan publik, serta ruang operasional untuk penegakan hukum, berlokasi strategis untuk mempermudah akses publik dan koordinasi dengan instansi lain.

Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan gedung BNNP Sumbar dengan pendekatan arsitektur fleksibilitas. Tujuannya adalah menciptakan bangunan yang adaptif terhadap perubahan fungsi organisasi, efisien dalam penggunaan ruang, dan representatif bagi institusi. Manfaat penelitian diharapkan dapat meningkatkan kinerja BNN dalam mendukung program P4GN, memberikan pelayanan publik yang optimal, serta menghadirkan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Dengan adanya bangunan ini diharapkan memberi manfaat dalam meningkatkan Kinerja BNN dalam mencegah dan memberantas kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus, dalam (Dewi & Hodayah, 2019) Herdiansyah (2015) menjelaskan penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, intens, merinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah – masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (berbatas waktu).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari observasi lingkungan sekitar, interaksi sesama staff atau karyawan, cara bekerja, hubungan kinerja serta tata ruang kantor dan fasilitas kantor terhadap lingkungan sekitar serta penunjang lainnya seperti sirkulasi, vegetasi, tautan lingkungan, dan hal lainnya. Data sekunder diambil diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, penelitian sebelumnya, dokumen pemerintah, berita, dan artikel informasi terpercaya lainnya mengenai kantor dan klinik BNN Provinsi yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini.

2. Perancangan Penelitian

Langkah pertama dalam merancang penelitian dimulai dengan identifikasi isu yang menjadi latar belakang. Selanjutnya, latar belakang tersebut diperkuat oleh data dan fakta yang menjelaskan dengan lebih jelas isu yang diangkat dalam penelitian ini. Dari latar belakang, dirumuskan rumusan masalah beserta tujuan dan sasaran penelitian. Data dan fakta yang ada

juga menghasilkan ide kebaruan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Ide kebaruan tersebut didasarkan pada tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya dan ditambah dengan pengumpulan data, baik berupa data primer maupun sekunder. Dari data-data ini, muncul sejumlah analisis yang akan membentuk dasar programming penelitian. Data-data yang diperoleh sebelumnya juga menjadi acuan dalam merancang konsep desain penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangunan Kantor dan Klinik BNN Provinsi Sumatera Barat dibangun dengan menerapkan arsitektur fleksibilitas yaitu dengan pembagian ruang modular yang dapat diubah sesuai kebutuhan organisasi, penggunaan dinding partisi tidak permanen yang memungkinkan transformasi ruang kerja individu menjadi ruang kolaboratif, penggunaan meja dan kursi multifungsi yang mendukung efisiensi ruang, sistem kontrol cahaya, ventilasi, dan keamanan yang menyesuaikan kebutuhan operasional, serta pengaturan sirkulasi yang jelas untuk membedakan ruang publik (layanan masyarakat), semi publik (ruang rapat), dan privat (ruang kerja pegawai).

1. Deskripsi Kawasan

Kawasan berada di salah satu kecamatan di Kota Padang, yaitu di Kecamatan Koto Tangah. Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang, site berada di kawasan zona C (Campuran) dan R (Perumahan).



Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kecamatan Koto Tangah
Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2011

Kecamatan Koto Tangah berada dalam jarak 7 km dari pusat kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Secara administrasi Kecamatan Koto Tangah memiliki batasan wilayah pada bagian Utara dengan Kab. Padang Pariaman, Selatan berbatasan dengan Kec. Padang Utara dan Kec. Nanggalo, Barat dengan Kab. Solok dan Kec. Pauh dan Timur dengan Samudera Indonesia.

a) Potensi Kawasan

Kondisi disekitar tapak merupakan salah kawasan pengembangan perkantoran untuk pelayanan masyarakat. Dengan Kriteria pemilihan Lokasi berdasarkan RTRW Kota Padang 2010 – 2030 mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan

Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 47). Adapun potensi yang dimiliki adalah Peruntukan lahan pada lokasi yang merupakan kawasan hutan lindung dan kawasan strategis dalam Pengembangan Kawasan Perkantoran dan Pemerintahan Kota, dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi, Site sudah dilengkapi dengan sarana utilitas yang baik, seperti jaringan Listrik, saluran drainase, jaringan telepon, saluran air bersih sehingga menguntungkan tapak. Dan kondisi tapak merupakan lahan kosong yang masih memiliki vegetasi yang memberi ketenangan dan keindahan alam di sekitar yang masih asri.

b) Permasalahan Kawasan

Permasalahan yang terdapat pada site saat ini, yaitu pada kondisi eksisting yang sekarang pedestrian dan drainase yang kurang dirawat dan tidak tertutup sehingga banyak sampah masuk dan mengakibatkan sumbatan pada drainase. Pada area tapak tidak terdapat akses sirkulasi kendaraan sehingga dibutuhkan penambahan jalan pada site.

2. Deskripsi Tapak

a) Lokasi



Gambar 2. Lokasi
Sumber : Data Penulis, 2024

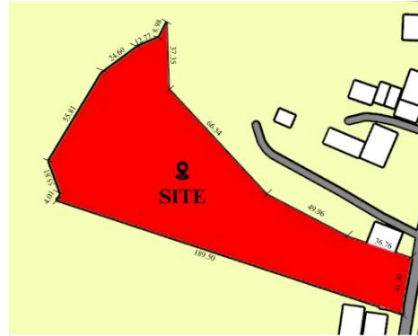
Lokasi tapak berada di Lahan Kosong Milik Kementerian Keuangan. Tapak memiliki luas 10.750 m².

Dengan batasan tapak :

Utara : Rumah Warga
Selatan : Lahan Pertanian
Barat : Jl. Adinegoro
Timur : Lahan Kosong

b) Ukuran dan Tata Wilayah

Luas site yang digunakan sebesar 10.750 m². Ukuran dan tata wilayah berkaitan dengan besaran ruang yang terpakai untuk bangunan juga merupakan ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu untuk menuju site hanya memiliki akses jalan utama dengan lebar 12 m².



Gambar 3. Ukuran Site
Sumber : Data Penulis, 2024

Berdasarkan RTRW Kota Padang dimana Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maksimum untuk kawasan adalah 60%

Berikut perhitungan dan ukuran tata wilayah berdasarkan KDB,KDH, dan GSB

$$\begin{aligned}
 \text{KDB} &= 60\% \times 10.750 \text{ m}^2 \\
 &= 6.450 \text{ m}^2 \\
 \text{KDH} &= 40 \% \times 10.750 \text{ m}^2 \\
 &= 4.300 \text{ m}^2 \\
 \text{GSB} &= \frac{1}{2} \times \text{lebar Jalan} + 1 \\
 &= \frac{1}{2} \times 6 \text{ m}^2 \times 1 \\
 &= 4 \text{ m}^2 \\
 \text{KLB} &= (\text{Luas site} \times \text{KLB}) / \text{KDB} \\
 &= (10.750 \times 3.6) / 6.450 \\
 &= 6 \text{ Lantai Maksimum}
 \end{aligned}$$

c) Peraturan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 47).

41	Penyiapan lahan unutup Pembanguan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota	Tersedianya lahan untuk pembangunan kawasan	Kec. Koto Tangah dan Kuranji	Pemerintah Kota Padang		APBD Kota
42	Pengembangan Kawasan Perkantoran dan Pemerintahan Kota	Pemindahan pusat perkantoran pemerintah Kota Padang	Kec. Koto Tangah dan Kuranji	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas DPRKPP	APBN & APBD Kota

Gambar 4. Tabel Peraturan Perwujudan Rencana Kawasan
Sumber : Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2011

c. Kawasan Perkantoran	Terdiri dari kawasan perkantoran pemerintah dan kawasan perkantoran swasta.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan perkantoran dan fasilitas penunjangnya; Diarahkan untuk penggunaan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan daerah atau pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan perdagangan dan jasa dan fasilitas penunjangnya Perumahan dan fasilitas penunjangnya 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) yang
-------------------------------	---	---	--	--

Gambar 5. Peraturan Kawasan Perkantoran
Sumber : Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2011

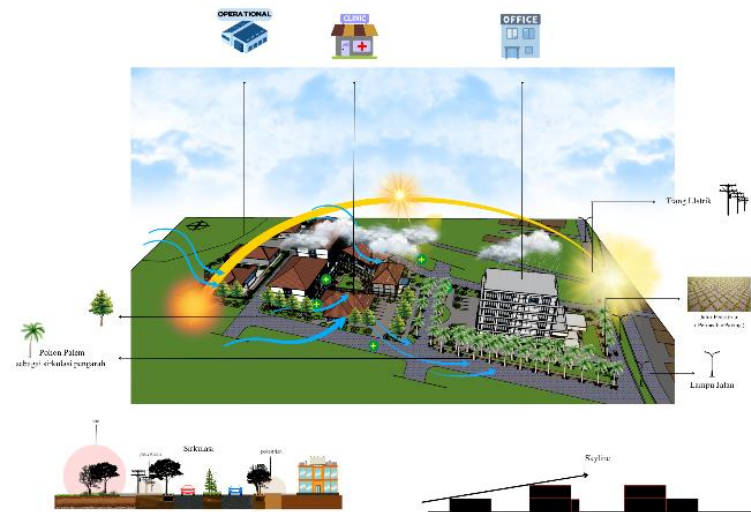
Pasal 18

Strategi pengembangan kawasan perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l meliputi :

- mempertahankan perkantoran pemerintah provinsi pada lokasi yang sudah berkembang saat ini;
- mengembangkan perkantoran pemerintah kota secara terpusat dan terpadu di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah;

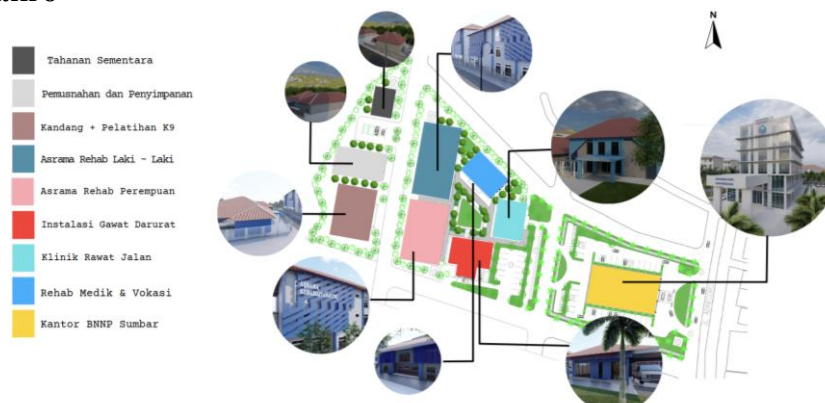
Gambar 6. Peraturan Kawasan Perkantoran
Sumber : Peraturan RTRW Pasal 18

3. Superimpose



Gambar 7. Superimpose
Sumber : Data Penulis, 2025

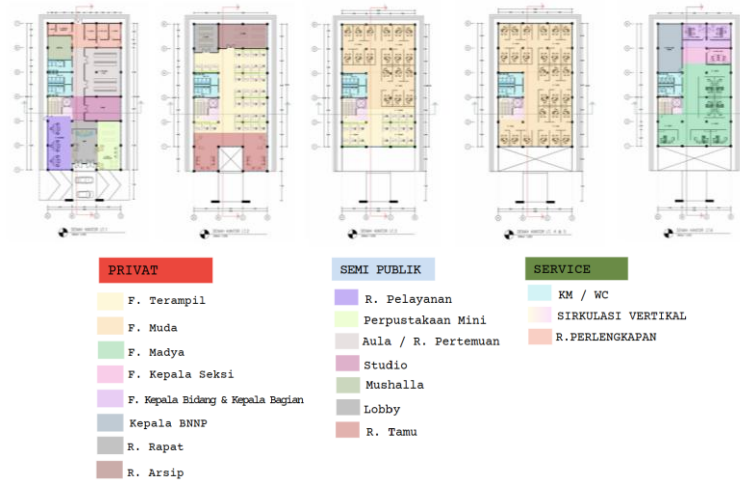
4. Zoning Makro



Gambar 8. Konsep Makro
Sumber : Data Penulis, 2025

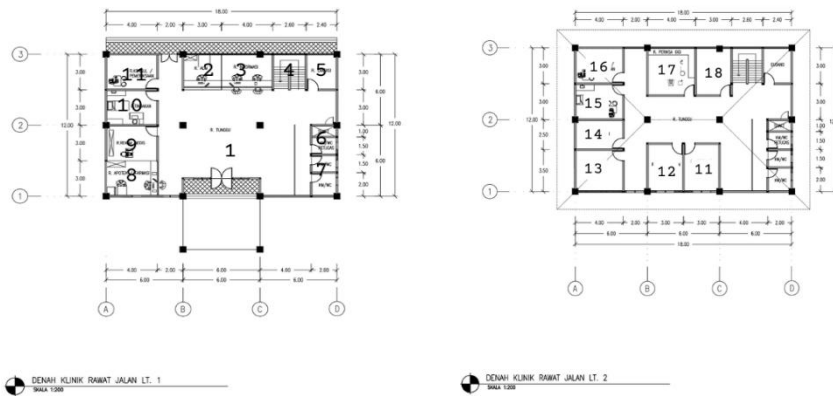
5. Denah

a) Denah Kantor BNN Provinsi Sumatera Barat



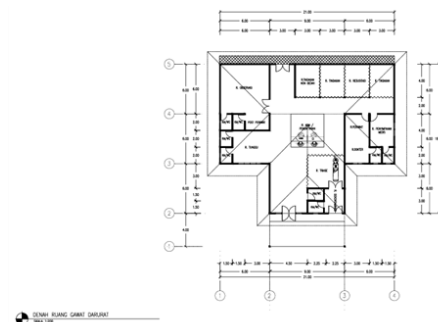
Gambar 9. Denah Kantor
Sumber : Data Penulis, 2025

b) Denah Klinik



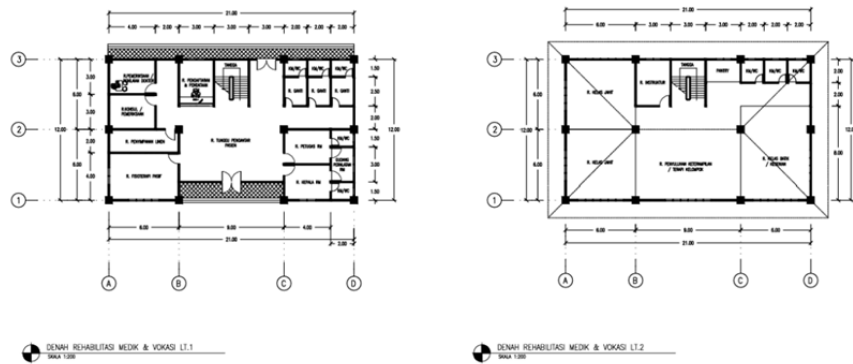
Gambar 10. Denah Klinik
Sumber : Data Penulis, 2025

c) Denah Instalasi Gawat Darurat



Gambar 11. Denah Instalasi Gawat darurat (IGD)
Sumber : Data Penulis, 2025

d) Denah Rehab Medik



Gambar 12. Denah Rehab Medik
Sumber : Data Penulis, 2025

e) Denah Asrama Laki – Laki



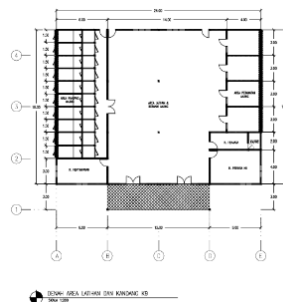
Gambar 13. Denah Asrama Laki - laki
Sumber : Data Penulis, 2025

f) Denag Asrama Perempuan



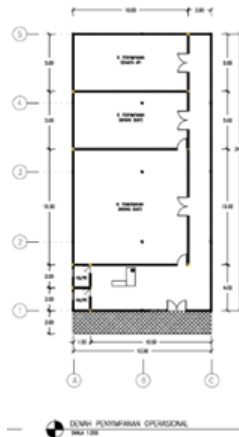
Gambar 14. Denah Asrama Perempuan
Sumber : Data Penulis, 2025

g) Denah Kandang dan Area Pelatihan K9



Gambar 15. Denah Kandang dan Area Pelatihan K9
Sumber : Data Penulis, 2025

h) Denah Gudang Penyimpanan dan Pemusnahan



Gambar 16. Denah Gudang Penyimpanan dan Pemusnahan
Sumber : Data Penulis, 2025

i) Denah Ruang Tahanan Sementara



Gambar 17. Denah Ruang Tahanan Sementara
Sumber : Data Penulis, 2025

6. Konsep Tapak

Berdasarkan peraturan tentang rencana tata ruang dan wilayah, pada lokasi tapak memiliki ketentuan dalam perencanaan bangunan yaitu KDB 60% dan KDH 40%. Dimana 60% merupakan luasan maksimum untuk yang terbangun dan 40% untuk ruang terbuka hijau dengan luas site 10.750 m².

a) Konsep Panca Indera Terhadap Tapak

- Kebisingan



Gambar 18. Analisa Kebisingan
Sumber : Data Penulis, 2024

Kebisingan utama berasal dari jalan utama. Hal ini dapat dikurangi dengan penambahan vegetasi disekitar kebisingan berasal. Penambahan vegetasi penting dilakukan karena merancang bangunan memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti kenyamanan dan keamanan.

- View

Tapak berada di Jl. Adinegoro yang menghadap arah timur, yang merupakan akses utama dan berhadapan langsung dengan tapak. Oleh karena itu, pandangan positif untuk zona site yang bertemu dengan jalan utama berada pada bagian timur. Sedangkan untuk bagian site yang tidak menemui jalan utama memiliki view ke arah Barat, Utara dan Selatan. Sehingga fasade utama yaitu kantor akan dioptimalkan menghadap jalan utama,



Gambar 19. Analisa View
Sumber : Data Penulis, 2024

b) Konsep Iklim

Kota Padang memiliki potensi pencahayaan alami yang baik dengan rata-rata 6-7 jam sinar matahari per hari serta sirkulasi angin cukup dengan kecepatan rata-rata 15 knots dari arah barat.



Gambar 20. Analisa Iklim
Sumber : Data Penulis, 2024

Konsep penataan strategis bukaan, seperti jendela dan orientasi bangunan utama menghadap timur barat . Sementara itu untuk bangunan klinik dan penunjang lainnya bukaan menghadap utara selatan. Dengan memanfaatkan cahaya matahari secara optimal sebagai pencahayaan alami untuk mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan dan mempertimbangkan sinar matahari agar tidak menghasilkan panas yang berlebihan pada bangunan.

c) Konsep Aksesibilitas dan Sirkulasi

Sirkulasi menuju site tidak sulit untuk ditemukan karena jalan menuju site hanya tersedia satu. Sirkulasi menuju tapak memiliki dua jalur utama (*two way*) dan masih berada di antara lokasi yang cukup dikenal yaitu di area perbatasan kota yang menghubungkan seluruh aktivitas masyarakat. Jalan ini bisa dilintasi oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, kendaraan pribadi ataupun angkutan umum, mobil box, dan truk muatan barang.



Gambar 21. Analisa Sirkulasi
Sumber : Data Penulis, 2024

Sedangkan sirkulasi menuju dalam site akan ditambahkan jalan sebagai sirkulasi antar zona pada site. Sehingga site menjadi tiga bagian zona. Pada site juga disediakan pedestrian yang langsung menuju jalan utama yaitu JL. Adinegoro.

d) Konsep Vegetasi Alami

Beberapa tanaman yang ada di dalam site semaksimal mungkin dipertahankan dan tanaman yang akan ditambahkan dapat meningkatkan pandangan visual positif di dalam site diselingi dengan tanaman – tanaman. Jenis – jenis tanaman yang akan digunakan untuk vegetasi ruang terbuka pada tapak sebagai penambah estetika, mengurangi kebisingan, pemecah angin, dan sebagai pengarah sirkulasi pada site adalah pohon cemara atau pohon palm yang ditata pada luar dan sekeliling site yang mengikuti arah sirkulasi dan penggunaan tanaman perdu yang biasanya digunakan untuk pembatas jalan setapak dan pembatas antar bangunan pelengkap.

7. Konsep Bangunan

a) Konsep Massa Bangunan

Dalam pengolahan analisa bentuk dan massa bangunan menggunakan bentukan site atau masa bangunan mengikuti bentuk site dengan dengan mengikuti alternatif dari analisa tapak serta adanya ruang multi fungsi dalam konsep *architecture* fleksibilitas yang mana rencana bentuk massa bangunan akan menggunakan sistem modular berbasis grid sebagai tahap awal pemenuhan kebutuhan lainnya seperti ruang, sirkulasi yang memadai dan utilitas yang baik. Dengan adanya fungsi yang berbeda.

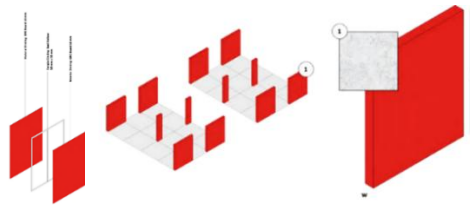


Gambar 22. Konsep Massa Bangunan
Sumber : Data Penulis, 2024

b) Konsep Ruang Dalam

Konsep fleksibilitas juga diterapkan pada desain klinik dan masa penunjang lainnya. Untuk menciptakan ruang yang bersifat fleksibel, pemilihan material untuk dinding pembatas ruang haruslah bersifat mudah dibongkar pasang serta *sustainable*.

Dengan teknis penambahan ruang pada *Future Development Space* yang menggunakan dinding lipat (*folded wall*) yang mana dinding tersebut dikaitkan pada sebuah rel dibawah balok yang emberikan kemudahan bagi penghuni untuk menggeser dinding. Secara tidak langsung ruang pada unit dapat ditambah amupun dikurangi yang menimbulkan bahwa arsitektur juga dapat tumbuh dan berkembang.



Gambar 23. Teknis *Future Development Space*
Sumber : google, 2024

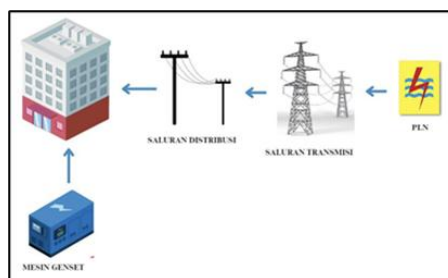
8. Konsep Struktur Bangunan

Berdasarkan analisis karakteristik geografis pada site, site memiliki jenis tanah aluvial / tanah lunak, oleh karena itu dengan penggunaan pondasi tiang pancang yang cocok digunakan untuk stabilitas tinggi terhadap beban vertikal dan horizontal dan bangunan bertingkat atau berlantai banyak yang mampu menahan gempa. Bangunan pada site menggunakan kombinasi rangka beton bertulang terdiri dari beton yang di cor ke dalam tulangan besi sehingga dapat bekerja dengan baik, karena beton di kompresi sangat kuat, dapat dengan mudah di produksi di lokasi, tidak mahal dan baja sangat kuat menahan tegangan. Untuk atap bangunan utama menggunakan dak beton dan untuk atap klinik serta bangunan pelengkap dan penunjang lainnya menggunakan atap pelana dengan konstruksi baja ringan.

9. Konsep Utilitas

a) Jaringan Listrik

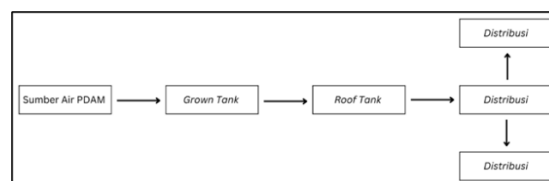
Sumber jaringan Listrik pada tapak berasal dari jaringan PLN. Namun untuk mengatasi pemadaman Listrik, maka disediakan juga *generator set* (genset). Sumber alternatif lainnya berasal dari panel solar sel / energi berkekuatan tenaga matahari untuk skala pengguna Listrik yang kecil, seperti lampu jalan maupun lampu taman. Selain itu penggunaan tenaga listrik pada bangunan menggunakan pencahayaan alami dengan memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari.



Gambar 24. Konsep Aliran Listrik
Sumber : Data Penulis, 2025

b) Sitem Air bersih

Konsep sumber air yaitu menggunakan sumber air PDAM dengan penggunaan sistem penyimpanan tangki bawah (Ground Tank) dengan bantuan pompa booster yang akan disalurkan ke jaringan pipa dalam gedung untuk mendorong air ke roof tank dan disalurkan ke tiap lantai bangunan.



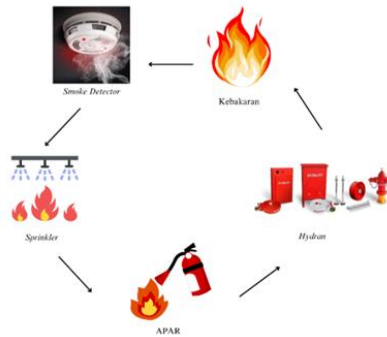
Gambar 25. Diagram Konsep Air Bersih
Sumber : Data Penulis, 2025

c) Sitem Air Kotor

Sistem instalasi air limbah dialirkan melalui selang / pipa drainase dan diolah terlebih dahulu melalui biofilter.

d) Sistem Penanganan Kebakaran

Sistem pencegahan kebakaran pada bangunan adalah dengan memakai *smoke detector*, *hydran*, *sprinkler*, apar dan usaha evakuasi berupa penempatan *fire escaping* berupa tangga darurat.



Gambar 26. Site Plan

Sumber : Data Penulis, 2025

10. Site Plan



Ket :

1. Kantor BNN Provinsi Sumbar
2. IGD
3. Rawat Jalan
4. Rehab Mediks
5. Asrama Laki-laki
6. Asrama Perempuan
7. Kandang dan Pelatihan K9
8. Gudang Penyimpanan dan Pemusnahan
9. Ruang Tahanan Sementara
10. IN
11. OUT
12. Parkir Mobil
13. Parkir Motor
14. Taman

Gambar 27. Site Plan

Sumber : Data Penulis, 2025

11. Perspektif



Gambar 28. Perspektif Eksterior

Sumber : Data Penulis, 2025



Gambar 29. Interior Ruang Kerja Kantor
Sumber : Data Penulis, 2025



Gambar 30. Interior Lobby Klinik
Sumber : Data Penulis, 2025

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait Kantor BNN Provinsi Sumatera Barat diperoleh Kesimpulan yaitu terdapat kebutuhan utama pada Kantor BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai kebutuhan organisasi yang dinamis serta mendukung operasional dan mendukung optimalisasi pelayanan publik. Dalam merancang kantor BNN Provinsi Sumatera Barat, dengan pendekatan fleksibilitas menjadi strategi untuk menjawab kebutuhan yang terus berkembang. Pendekatan ini diterapkan melalui desain ruang yang multifungsi, modular, dan adaptif terhadap perubahan fungsi dan kebutuhan di masa depan. Penataan ruang memperhatikan prinsip efisiensi, sirkulasi yang lancar, dan kenyamanan kerja, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas sekaligus kolaborasi antar pegawai. Selain itu, integrasi elemen fleksibilitas juga mencakup pemanfaatan furnitur modular dan sistem teknologi cerdas yang memungkinkan penyesuaian ruang secara cepat dan hemat biaya. Kantor ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan misi P4GN serta memperkuat citra institusi sebagai lembaga yang adaptif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rekomendasi diberikan agar pemerintah daerah mendukung pembangunan ini melalui penyediaan lahan, anggaran, serta kolaborasi lintas sektor untuk keberlanjutan operasional kantor BNN Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, M., Rismayadi, B., & Pertiwi, W. (2024). Analisis Lingkungan Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 5721-5735.
- Badan Narkotika Nasional. 2024. Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2024. Kepala Badan Narkotika Nasional. Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional. 2024. Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Jakarta
- Keputusan Kepala Laboratorium. 2021. Keputusan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tentang Pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Jakarta.
- Peraturan Menteri. 2015. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 Tahun 2015
- Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Kebutuhan Ruang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan.
- Peraturan Menteri. 2023. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi. Menteri Kesehatan RI. Jakarta.
- Peraturan Menteri. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Kementerian PUPR RI. Jakarta.
- Peraturan Menteri. 2024. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.7 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Presiden. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Nafsiah Mboi. Jakarta.
- Purba, N. F., Cardiah, T., & Nugroho, A. (2020). Perancangan Baru Interior Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Bandung. *eProceedings of Art & Design*, 7(3).